

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dirancang untuk mendukung pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Program utamanya mencakup pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan DAS, serta penyediaan sarana penunjang pemerintahan. Kegiatan yang dilaksanakan cukup beragam, mulai dari administrasi internal hingga rehabilitasi lahan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
2. Prosedur anggaran program dan kegiatan dilakukan secara sistematis, dimulai dari penyusunan RKA di tingkat SKPD, pembahasan internal dinas, pengajuan ke BPKAD, pembahasan bersama TAPD dan DPRD, hingga penetapan menjadi APBD dan DPA. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Setiap tahapan dilakukan dengan mengacu pada regulasi pemerintah daerah dan prinsip akuntabilitas.
3. Penyusunan pelaporan realisasi anggaran dilakukan setelah program dan kegiatan berjalan. Pelaporan ini mencakup realisasi keuangan dan realisasi fisik yang

disampaikan secara berkala. Pelaporan dilakukan melalui sistem SIPD dan LPSE/SiRUP untuk memastikan transparansi, keterlacakan, dan akuntabilitas anggaran.

5.2 Saran

Agar pengelolaan program dan pelaporan anggaran di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat semakin baik, maka disarankan untuk meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dalam proses pelaporan realisasi kegiatan. Hal ini penting agar data yang dilaporkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pimpinan dan instansi terkait. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan pelaporan perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan teknis, terutama bagi operator aplikasi SIPD dan LPSE. Koordinasi antar bidang dalam pengumpulan data juga perlu diperkuat agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk visual (foto atau video) juga perlu dilengkapi dan ditata dengan baik untuk memperkuat bukti pelaksanaan kegiatan. Terakhir, perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan kehutanan, terutama dalam program-program yang melibatkan kelompok tani hutan, agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian hutan.